

JOURNAL OF EDUCATION

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

Kepemimpinan Perempuan Dalam Pemerintahan: Capaian Dan Hambatan

Raodatul Hazmi¹, Sulistiani², Wulida Indal Maghfirah³

¹Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, raodatulhazmi@gmail.com

²Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia sulistia1628@gmail.com

³Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia wulidaindalm@gmail.com

Abstrak: Artikel ini membahas kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan di Indonesia, mengidentifikasi capaian yang telah diraih serta hambatan yang masih dihadapi. Perempuan di Indonesia telah menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang signifikan dengan menduduki posisi strategis seperti menteri, walikota, dan anggota legislatif, serta berkontribusi dalam pembuatan kebijakan yang mendorong pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana perempuan berperan dalam kepemimpinan pemerintahan di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi partisipasi mereka dalam posisi strategis pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, yaitu menganalisis berbagai literatur yang relevan mengenai kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan: capaian dan hambatan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia telah mampu membuktikan kemampuan dan keberhasilan sebagai pemimpin, serta layak mendapatkan pengakuan dan kesempatan yang setara dalam posisi kepemimpinan. Meskipun demikian, mereka masih menghadapi tantangan besar, seperti stereotip gender, norma sosial dan budaya patriarkis, kurangnya dukungan institusional, dan tanggung jawab ganda antara karir dan peran domestik. Hambatan-hambatan ini menghalangi potensi penuh perempuan untuk berkembang dalam kepemimpinan di pemerintahan. Manfaat dari kajian ini adalah dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih inklusif, adil, dan berdaya saing tinggi.

Kata Kunci: Perempuan, Kepemimpinan, Pemerintahan, Hambatan, Capaian

*Correspondence Address: raodatulhazmi@gmail.com

Article History	Received	Revised	Published
	2 June 2025	-	30 March 2026

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan merupakan salah satu isu yang terus berkembang dan mendapat perhatian luas di berbagai belahan dunia. Pada masa lalu, peran perempuan dalam politik dan pemerintahan sering kali dipandang sebagai sesuatu yang kurang penting atau bahkan tidak mungkin tercapai. Dominasi pria dalam dunia politik telah menciptakan hambatan yang signifikan bagi perempuan untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan pada tingkat pemerintahan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perjuangan panjang dalam memperjuangkan kesetaraan gender, semakin banyak perempuan yang berhasil menembus batasan-batasan tersebut dan menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi juga mulai terlihat di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Alice Eagly adalah salah satu psikolog sosial terkemuka yang banyak meneliti tentang kepemimpinan dan gender. Dalam teorinya mengenai *Gender and Leadership Styles*, Eagly menyatakan bahwa perempuan lebih cenderung mengadopsi gaya kepemimpinan yang lebih transformasional dan demokratis, yang lebih memperhatikan kesejahteraan anggota tim dan berfokus pada motivasi intrinsik. Namun, Eagly juga mencatat bahwa perempuan sering menghadapi hambatan dalam mencapai posisi kepemimpinan karena adanya stereotip gender yang melekat dalam masyarakat. Pentingnya pengakuan terhadap potensi perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan semakin mendesak seiring dengan tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih representatif dan inklusif. Dalam konteks ini, kebijakan afirmatif seperti kuota perempuan di parlemen atau posisi pemerintahan, serta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang lebih terakses oleh perempuan, menjadi hal yang sangat relevan untuk membangun pemerintahan yang lebih seimbang dan adil.

Perempuan yang berhasil menduduki jabatan penting dalam pemerintahan telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembentukan kebijakan publik, advokasi hak-hak perempuan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan ini, meskipun masih terbilang minim jika dibandingkan dengan jumlah laki-laki yang mendominasi struktur pemerintahan, menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas dan potensi yang sama dalam memimpin dan mengambil keputusan strategis. Dalam banyak kasus, kepemimpinan perempuan telah terbukti membawa pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan sosial, dengan perhatian lebih pada isu-isu yang sering kali terabaikan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan. Berangkat dari latar belakang diatas adapun yang menjadi rumusan masalah adalah Apa saja capaian perempuan dalam pemerintahan dan apa saja hambatan-hambatan yang dialami perempuan dalam pemerintahan?

METODE | METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur sebagai metode untuk menganalisis capaian dan hambatan kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan. Menurut Danial dan warsinah (2009) studi literatur adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan sejumlah buku atau majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemikiran, temuan, dan teori-teori yang relevan yang telah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya, serta memberikan dasar yang kuat untuk memahami konteks yang lebih luas mengenai isu ini. Dengan menggunakan studi literatur, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh wawasan mendalam mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam pemerintahan dan untuk menganalisis apakah capaian yang telah diperoleh sejalan dengan tantangan yang dihadapi.

Studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemikiran, temuan, dan teori-teori yang relevan yang telah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya, serta memberikan dasar yang kuat untuk memahami konteks yang lebih luas mengenai isu ini. Dengan menggunakan studi literatur, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh wawasan mendalam mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam pemerintahan dan untuk menganalisis apakah capaian yang telah diperoleh sejalan dengan tantangan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

Dalam penekanan peran gender serta peran pemimpin, peran teori sosial berpendapat bahwa pemimpin menempati peran yang didefinisikan pada posisi

mereka yang spesifik dalam hierarkidan sekaligus berfungsi di bawah kendala peran gender mereka. Dalam hal definisi umum peran sosial sebagai harapan yang berlaku untuk orang yang menempati posisi sosial tertentu dalam masyarakat atau anggota pada kelompok tertentu dimana pada kategori sosial sangat dibutuhkan dalam masyarakat sebagai makhluk sosial. Peran gender adalah keyakinan konsensual tentang atribut perempuan dan laki-laki. Jika jumlah perempuan lebih banyak dalam proses pengambilan keputusan, maka fokus kehidupan politik akan berubah. Dampak yang paling jelas adalah akan terjadinya perluasan wilayah politik ke arah masalah-masalah dan isu-isu yang semula dianggap bukan isu politik seperti kesejahteraan anak, perlindungan terhadap re-produksi perempuan, dan lain-lain. Kehidupan politik barangkali juga akan lebih bermoral karena perempuan lebih mementingkan isu politik konvensional seperti ekonomi, pendidikan, perumahan, lingkungan, kesejahteraan sosial.

A. Capaian Perempuan Dalam Pemerintahan

Capaian perempuan dalam pemerintahan telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun masih ada tantangan untuk mencapai kesetaraan penuh. Berikut beberapa capaian penting perempuan dalam pemerintahan:

1. Posisi Kepemimpinan

Perempuan telah berhasil menduduki posisi kepemimpinan yang tinggi dalam pemerintahan, seperti menjadi presiden, perdana menteri, menteri, serta walikota di berbagai negara. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kemampuan kepemimpinan tidak ditentukan oleh gender, melainkan oleh kompetensi dan dedikasi seseorang. Di berbagai belahan dunia, perempuan kini semakin diakui perannya dalam politik dan pemerintahan, membuktikan bahwa mereka mampu menjalankan tanggung jawab besar di tingkat nasional maupun internasional.

Contohnya, di Indonesia, perempuan seperti Megawati Soekarnoputri pernah menjabat sebagai Presiden. Saat ini, terdapat banyak perempuan yang menduduki jabatan penting seperti menteri dalam kabinet pemerintahan. Kehadiran mereka dalam posisi strategis membuktikan bahwa perempuan mampu memimpin negara serta mengambil keputusan penting yang berdampak besar pada kebijakan nasional. Hal ini sekaligus mendorong kesetaraan gender dalam dunia politik dan pemerintahan.

2. Perubahan Kebijakan yang Progresif

Perempuan yang berada di posisi pemerintahan sering kali mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kesejahteraan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak. Mereka cenderung memiliki perspektif yang lebih sensitif terhadap isu-isu sosial, sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepedulian terhadap pendidikan, kesehatan, serta perlindungan hak-hak dasar masyarakat.

Sebagai contoh, banyak perempuan menteri yang aktif memperjuangkan kebijakan pemberdayaan perempuan, penghapusan kekerasan berbasis gender, dan perlindungan hak-hak keluarga. Kehadiran mereka dalam pemerintahan membawa angin segar bagi perubahan kebijakan yang progresif dan berkeadilan. Hal ini membuktikan bahwa partisipasi perempuan dalam politik tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

3. Pengaruh dalam Pengambilan Keputusan Politik

Dalam beberapa negara, keterlibatan perempuan dalam badan legislatif semakin meningkat, membuka peluang bagi mereka untuk ikut serta dalam pembuatan undang-undang yang lebih beragam dan mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat. Meningkatnya jumlah perempuan di parlemen menjadi indikator positif bahwa suara mereka semakin diperhitungkan dalam proses legislasi, memberikan dimensi baru dalam kebijakan publik yang lebih inklusif.

Perempuan yang terpilih dalam parlemen membawa perspektif yang berbeda, sering kali lebih peduli terhadap isu sosial dan kesejahteraan keluarga. Dengan pengalaman hidup yang beragam, mereka mampu mendorong kebijakan yang lebih sensitif terhadap masalah-masalah seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Hal ini memungkinkan terciptanya undang-undang yang lebih adil dan mencakup kepentingan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang sering terpinggirkan.

4. Partisipasi dalam Diplomasi dan Hubungan Internasional

Perempuan juga semakin terlihat dalam peran diplomatik dan hubungan internasional, menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memimpin di arena global. Seiring dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam diplomasi, mereka berperan aktif dalam mempromosikan nilai-nilai perdamaian, hak asasi manusia, dan kerjasama internasional yang lebih inklusif. Keberadaan perempuan dalam posisi ini membawa perspektif yang lebih beragam dan mendorong terciptanya kebijakan luar negeri yang lebih manusiawi dan berbasis pada perdamaian dunia.

Contoh terkemuka dalam hal ini adalah mantan Menteri Luar Negeri AS, Madeleine Albright, yang terkenal dengan kontribusinya dalam diplomasi internasional, serta mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, yang memainkan peran penting dalam hubungan internasional dan memperjuangkan stabilitas regional. Kedua tokoh ini, bersama perempuan lainnya yang terlibat dalam diplomasi, membuktikan bahwa perempuan dapat memberikan pengaruh besar dalam membentuk kebijakan luar negeri yang mendorong perdamaian dan kerjasama antarnegara.

5. Perjuangan untuk Kesetaraan Gender di Pemerintahan

Selain mencapai posisi tinggi, perempuan dalam pemerintahan juga berperan besar dalam memperjuangkan kesetaraan gender di lembaga-lembaga pemerintah. Mereka berkomitmen untuk meningkatkan representasi perempuan di semua tingkatan pemerintahan, dengan tujuan agar suara perempuan dapat lebih terdengar dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Upaya ini mencakup berbagai inisiatif untuk mengurangi ketidaksetaraan yang ada, serta mengadvokasi kebijakan yang mendukung partisipasi aktif perempuan dalam proses politik.

Salah satu langkah penting yang diambil oleh perempuan di pemerintahan adalah mendorong kebijakan kuota gender di parlemen dan lembaga legislatif lainnya. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan politik. Selain itu, mereka juga berjuang untuk menghapuskan diskriminasi yang masih ada dalam sistem politik, sehingga menciptakan ruang yang lebih adil bagi perempuan untuk berperan dalam pemerintahan dan memperjuangkan hak-hak mereka.

Secara keseluruhan, capaian perempuan dalam pemerintahan menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun tantangan untuk mencapai kesetaraan gender

secara penuh tetap ada. Mereka telah membawa perubahan positif dalam kebijakan, memperjuangkan hak-hak perempuan, dan menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dapat memberikan dampak yang besar dalam pembangunan sosial dan politik suatu negara.

B. Hambatan Perempuan Dalam Pemerintahan

Menurut Hubeis (sebagaimana disampaikan dalam Harjani 2001), perempuan memegang peranan strategis yang melibatkan beberapa dimensi, yakni sebagai pekerja rumah tangga yang mengelola rumah, membesarkan, dan mengasuh anak-anak. Selain itu, perempuan juga berperan sebagai pekerja transisi yang aktif dalam usaha keluarga, serta sebagai pekerja di luar rumah tangga yang menjalankan peran sebagai perempuan karier. Hubeis menekankan bahwa perempuan memiliki potensi luar biasa yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan bangsa. Sebagai pendidik utama bagi generasi penerus bangsa, perempuan memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, perempuan perlu memiliki wawasan dan pengalaman yang luas di bidang teknologi informasi dan komunikasi agar dapat menjalankan peran ini secara optimal. Pentingnya peran perempuan dalam mendidik generasi penerus bangsa tidak hanya akan berdampak pada kecerdasan anak-anak, tetapi juga pada pembentukan hati nurani mereka. Dalam era digital, perempuan tidak hanya diharapkan berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga dihadapkan pada tuntutan untuk dapat aktif dalam usaha keluarga dan berkiprah di dunia karier. Dengan demikian, perempuan dapat lebih efektif mengoptimalkan potensi mereka untuk berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan negara. Menurut Farida Nurland (Dalam Fransisia 2009) Perempuan sebagai pemimpin seringkali menghadapi berbagai kendala dan hambatan yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mencapai posisi kepemimpinan dan berkontribusi secara maksimal. Beberapa kendala yang sering dihadapi oleh perempuan sebagai pemimpin meliputi:

1. Stereotip Gender

Stereotip gender merujuk pada pandangan atau anggapan yang telah terbentuk dalam masyarakat mengenai peran, sifat, dan kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Misalnya, banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa laki-laki lebih rasional dan kompeten dalam bidang teknis atau kepemimpinan, sementara perempuan dianggap lebih cocok untuk mengurus urusan rumah tangga dan perawatan anak. Stereotip ini sering kali membatasi kesempatan bagi individu untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka, karena mereka terjebak dalam ekspektasi sosial yang sempit dan kaku. Menurut Judith Butler, seorang ahli teori gender, stereotip gender adalah konstruksi sosial yang diperkuat melalui performativitas, yaitu bagaimana perilaku kita dipengaruhi oleh norma-norma yang ada, sehingga membentuk identitas gender yang diakui oleh masyarakat.

Stereotip gender tidak hanya membatasi individu, tetapi juga memperkuat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam pendidikan, pekerjaan, dan politik. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan kesempatan dan merugikan perempuan, terutama dalam mencapai posisi kepemimpinan atau akses ke sumber daya yang lebih besar. Simone de Beauvoir, dalam karya terkenalnya *The Second Sex*, menyatakan bahwa perempuan sering kali dianggap sebagai "yang lain" atau "the second sex," yang mengarah pada

ketidaksetaraan hak dan peran dalam masyarakat. Oleh karena itu, penghapusan stereotip gender sangat penting untuk mewujudkan kesetaraan yang lebih nyata dan memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk berkontribusi sesuai dengan bakat dan kemampuannya tanpa dibatasi oleh norma gender tradisional.

2. Norma Sosial dan Budaya

Budaya patriarki yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia juga menjadi salah satu tantangan utama bagi perempuan dalam mencapai posisi kepemimpinan. Dalam banyak kasus, norma sosial dan budaya menganggap peran utama perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga atau pengasuh keluarga, bukan sebagai pemimpin. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap kesempatan untuk berkembang di dunia profesional dan politik. Banyak perempuan yang menghadapi diskriminasi atau penolakan dari keluarga, masyarakat, bahkan kolega mereka karena melanggar norma-norma tradisional yang membatasi peran mereka.

3. Kurangnya Dukungan Institusional

Selain hambatan budaya, kebijakan organisasi yang tidak mendukung kesetaraan gender juga menjadi kendala signifikan bagi perempuan dalam meraih posisi kepemimpinan. Banyak perusahaan atau institusi yang belum memiliki kebijakan yang memadai untuk memfasilitasi perempuan dalam mencapai karir yang setara dengan laki-laki, seperti kebijakan cuti melahirkan yang terbatas, atau tidak adanya program mentoring yang mengarah pada pemberdayaan perempuan dalam organisasi. Ketidakhadiran kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dapat menyebabkan perempuan kesulitan menapaki jalur karir yang sama dengan rekan laki-laki mereka.

4. Tanggung Jawab Ganda

Perempuan di Indonesia sering kali menghadapi tantangan "tanggung jawab ganda," yakni harus mengelola tuntutan pekerjaan sekaligus mengurus rumah tangga dan keluarga. Peran ganda ini sering kali membebani perempuan, yang harus menyeimbangkan pekerjaan profesional dengan kewajiban domestik, seperti merawat anak, mengurus rumah, atau merawat anggota keluarga lainnya. Keterbatasan waktu dan energi ini sering kali menghalangi perempuan untuk mengejar peluang-peluang karir yang lebih tinggi atau untuk mengembangkan diri secara maksimal dalam peran kepemimpinan, karena banyak perempuan yang terpaksa memilih antara karir atau keluarga, sebuah dilema yang jarang dihadapi oleh laki-laki.

5. Kesenjangan Keseimbangan Hidup dan Karier

Kesenjangan antara kehidupan pribadi dan karier sering kali menjadi tantangan besar, terutama bagi perempuan yang berusaha menyeimbangkan kedua aspek tersebut. Banyak perempuan merasa terjebak dalam tekanan untuk memenuhi ekspektasi profesional sambil tetap mengurus rumah tangga dan keluarga. Hal ini dapat menyebabkan stres, kelelahan, dan bahkan pengorbanan terhadap kesejahteraan pribadi. Dalam beberapa budaya, ada anggapan bahwa perempuan harus mengutamakan keluarga, sementara laki-laki dianggap lebih bebas untuk fokus pada karier mereka. Kesenjangan ini semakin diperburuk oleh kurangnya kebijakan yang mendukung fleksibilitas kerja, seperti cuti keluarga yang memadai atau jam kerja yang fleksibel, yang memungkinkan individu untuk menyeimbangkan tanggung jawab mereka di rumah dan di tempat kerja.

Beberapa ahli menganggap kesenjangan antara kehidupan pribadi dan karier ini sebagai masalah struktural yang memerlukan perubahan di tingkat kebijakan dan budaya organisasi. Menurut Sheryl Sandberg, dalam bukunya *Lean In*, perempuan sering kali dihadapkan pada pilihan sulit antara mengejar ambisi profesional dan memenuhi peran tradisional dalam keluarga. Sandberg menyarankan bahwa untuk mengatasi kesenjangan ini, perempuan perlu diberdayakan untuk mengejar ambisi mereka, namun juga penting bagi organisasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung, seperti penerapan kebijakan keseimbangan kerja-kehidupan yang lebih baik dan pengakuan terhadap peran perempuan dalam kedua dunia tersebut. Di sisi lain, kesenjangan ini juga menunjukkan perlunya kesadaran kolektif untuk mengubah norma sosial yang mendikte peran gender, sehingga perempuan dan laki-laki dapat lebih mudah mencapai keseimbangan yang lebih adil antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan di Indonesia telah mencapai berbagai capaian signifikan, meskipun perjalanan menuju kesetaraan penuh masih diwarnai oleh tantangan yang besar. Perempuan kini semakin menunjukkan kemampuan mereka dalam memimpin, baik di posisi strategis pemerintahan, maupun dalam pembuatan kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan masyarakat. Peran mereka sebagai walikota, menteri, dan anggota legislatif menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang setara dengan laki-laki dalam mengambil keputusan penting yang berdampak pada pembangunan sosial dan politik. Selain itu, perempuan juga turut berperan dalam mempengaruhi kebijakan negara, serta menciptakan perubahan yang lebih inklusif dan adil, terutama dalam isu-isu terkait kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.

Namun demikian, meskipun telah banyak pencapaian, perempuan masih menghadapi sejumlah hambatan yang perlu diatasi untuk mencapai kesetaraan yang lebih optimal. Stereotip gender, norma sosial dan budaya yang patriarkis, serta kurangnya dukungan institusional seringkali membatasi peran perempuan dalam dunia pemerintahan. Selain itu, tanggung jawab ganda sebagai profesional sekaligus pengurus rumah tangga menjadi beban tambahan yang harus dihadapi oleh banyak perempuan. Oleh karena itu, untuk mencapai kesetaraan yang sejati, diperlukan perubahan mendalam dalam struktur sosial, kebijakan, dan budaya organisasi yang mendukung pemberdayaan perempuan dalam kepemimpinan. Kesadaran kolektif dan upaya sistematis dalam mengatasi hambatan-hambatan ini akan membuka jalan bagi perempuan untuk lebih banyak berperan dalam membentuk masa depan negara.

REFERENSI | REFERENCE

- Astuti Puji Rini.(2019).*Optimalisasi Pemberdaya Perempuan dalam Kepemimpinan Efektif*.Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman.Vol.2,No.2
- Alvado Eggi, Putri Prawinta.(2021).*Prespektif Feminisme dalam Kepemimpinan Perempuan di Indonesia*.Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial.Vol.1,No.6
- Bayumi.(2022).*Konstruksi Peran Perempuan dalam Membangun Perekonomian sebagai Penguatan Kesetaraan Gender di Indonesia*.Journal Of Woman And Children Studies.Vol.2, No
- Damayanti Reni,.dkk.(2025).*Keterwakilan Perempuan dalam Politik (Studi Kasus: Caleg Perempuan DPR-RI Tahun 2024-2029)*.Jurnal Pemerintahan dan Politik. Vol.10,No.1

- Kurniawansyah Edy.,dkk.(2021).*Habitulasi Nilai-Nilai Karakter Sebagai Perilaku Anti Korupsi Pada Masyarakat Kajang*.Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman. 8(1).
- Nursyifa Alfi.,dkk.(2023).*Partisipasi Perempuan dalam Politik*.Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan.Vol.9,No.1
- Okraviana Devita.(2019).*Politik Perempuan*.
- Purwanri Ika.,dkk.(2022).*Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi*.Jurnal UMPR.
- Rahmayanthi Dinny.,dkk.(2023).*Tantangan dan Peluang Perempuan Sebagai Pemimpin dalam Berbagai Bidang*.Jurnal Pendidikan dan Konseling.Vol.5 No.6
- Shafira.,dkk.(2024).*Tantangan dan Peluang Kepemimpinan Perempuan Dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam*.Jurnal Hukum Keluarga Islam.Vol.2,No.2
- Sahban Hernita.(2016).*Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Indonesia*.Jurnal Ilmiah Bongaya.Vol.2,No.1